

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Provinsi NTB pada Peningkatan Profesionalisme ASN menuju terwujudnya Reformasi Birokrasi yang merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang pada akhirnya akan menciptakan suatu ekosistem baru yang disebut Good Governance yang kemudia hal ini menyangkut 3 aspek penting antara lain aspek Kelembagaan (Organisasi),Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia.

Pembenahan Sumber Daya Manusia menepatkan BPSDMD sebagai salah satu motor penggerak dalam pelaksanaannya. yang tentunya bukan hal mudah untuk dapat mewujudkannya terdapat banyak tantangan serta permasalahan yang harus dihadapi oleh BPSDMD dalam upaya pembenahan sumber daya manusia menuju ASN Profesional. Dengan Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 (Pasal 21) yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 (duapuluh) JP dalam 1 tahun.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur menjadi pendorong dalam penataan menejemen Sumber Daya Manusia sebagai tujuan yang tertuang dalam Rencana Setrategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika perspektif lama memandang pegawai hanya sebagai factor produksi, maka dengan pendekatan human capital yang saat ini dianut, pegawai harus dipandang sebagai asset organisasi. Oleh karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi ASN merupakan modal dalam upaya peningkatan organsisasi.

Belum terbentuknya *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN yang dimiliki oleh suatu Lembaga Pemerintah. Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mewujudkan *Good Governance* terus berupaya dalam meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN yang diliki yang dalam Dimensi Kompetensi menjadi tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang Pendidikan dan pelatihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan Review Renstra BPSDMD Provinsi NTB pada tahun 2020 yang memberikan arah baru bagi BPSDMD dalam penentuan indikatornya menjadi "Indeks Profesionalisme ASN" Dimensi Kompetensi dimana BPSDMD Provinsi NTB bersama dengan BKD Provinsi NTB dengan Biro Organisasi menunjang Program unggulan Gubernur Provinsi NTB yakni "Menajemen Talenta".

Secara spesifik BPSDMD dapat menyimpulkan Isu-isu strategis yang akan di hadapi dalam 5 tahun kedepan antara lain:

1. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara

belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan SDM belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini BPSDMD Provinsi NTB perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai program kediklatan.

2. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responship terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan SDM pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan diklat selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan Pendidikan dan pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan.
3. BPSDMD Provinsi NTB merupakan Lembaga yang sudah terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kediklatan secara profesionalisme, sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Saat Renstra 2019-2023 ini dibuat kondisi prasarana dan sarana diklat banyak yang rusak akibat bahkan gedung tempat penyelenggaraan diklat ada yang diberi zona merah oleh Dinas PU Provinsi NTB, sementara dana untuk perbaikan gedung dan sarana prasara diklat lainnya sangat minim untuk tahun 2019, untuk itu upaya yang ditempuh adalah dengan merencanakan rehabilitasi gedung dan sarana prasarana lainnya secara bertahap selama tiga tahun berturut-turut pada Rensta BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019-2023.
4. Secara umum alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan semua jenis diklat sangat minim sementara objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya;

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah“
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ,Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan- Badan Dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat .
9. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023.

C. GAMBARAN UMUM

1. Pembentukan dan Kedudukan

Pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah bidang Pendidikan dan Pelatihan, hal ini Diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan- Badan Dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat .

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan- Badan Dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Pengembangan Sumber Daya

Aparatur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diberikan pemerintah kepada Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Penyiapan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis;
- d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;

3. Susunan Organisasi

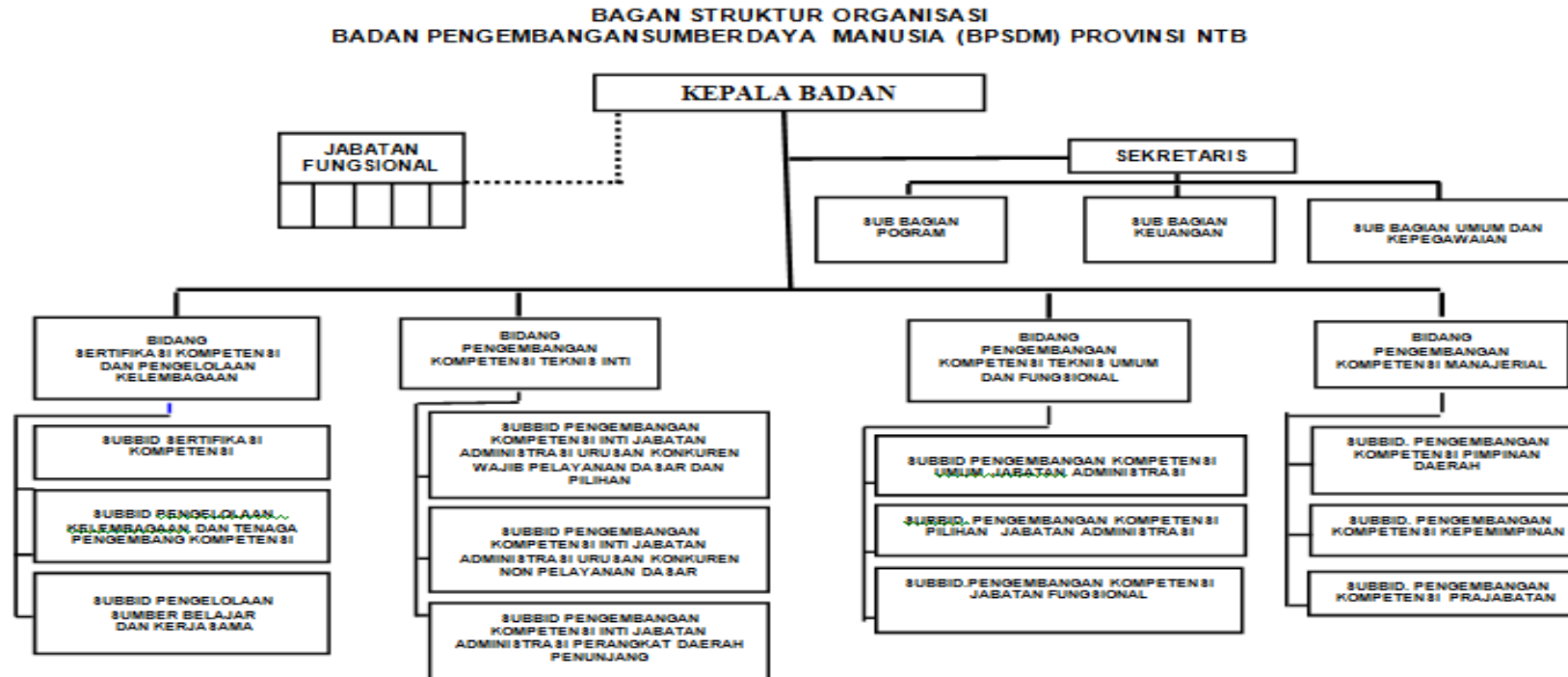
Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan dan ;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri dari :
 - Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
 - Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
 - Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknik Inti , terdiri dari :
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan dasar dan pilihan;
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Nonplayanan Dasar;
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Terdiri dari:
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 - Subbidang pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, terdiri dari :
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan;
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Prajabatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional/Widyaiswara

Adapun bagan struktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

GAMBAR 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Activ

4. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. Saat ini, sumber daya manusia sudah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya belaka, tetapi merupakan suatu modal atau aset dalam suatu organisasi sehingga saat ini istilah **human resource** sudah beralih menjadi **human capital**. Sumber daya manusia dilihat sebagai aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan serta sebagai investasi bagi suatu organisasi.

Oleh karenanya sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, BPSDMD Provinsi NTB saat ini didukung oleh sumberdaya Aparatur yang telah menempuh pendidikan formal dengan jenjang yang variatif dari berbagai disiplin ilmu, sampai dengan 31 Desember 2020 dari 139 orang, jumlah aparatur yang ada pada BPSDMD Provinsi NTB pendidikan yang mendominasi adalah lulusan Sarjana diikuti lulusan SMA kemudian lulusan Pasca Sarjana sehingga dari segi kualitas memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara. Adapun rincian pegawai berdasarkan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai BPSDMD Pemerintah Prov. NTB
Berdasarkan Status Pendidikan per 31 Desember 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	STATUS		
		PNS	PTT	JUMLAH
1.	Strata 3 (S3)	2	-	3
2.	Strata 2 (S2)	36	-	36
3.	Starata (S1)	30	9	39
4.	D.IV	4	-	4
5.	D.III	1	-	1
6.	D.II	-	-	-
7.	SLTA	22	24	46
8.	SLTP	0	3	3
9.	SD	-	3	3
JUMLAH		95	39	134

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, BPSDMD Provinsi NTB 2020

Sedangkan susunan pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai BPSDMD Prov. NTB
Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2020

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	5 orang
3	Eselon IV	15 orang
4	Fungsional Umum	42 orang
5	PTT	39 Orang
TOTAL		134

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, BPSDMD Provinsi NTB 2020

Sedangkan dari komposisi menurut status dan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai BPSDMD Daerah Prov. NTB
Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2020

NO	JABATAN	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV	15
4	FUNGSIONAL UMUM	42
5	FUNGSIONAL TERTENTU	32
TOTAL		95

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, BPSDMD Provinsi NTB 2020

5. Gambaran Aset yang Dikelola

Untuk menunjang dan mendukung kelancaran dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdiri di atas areal seluas 6673 m² satu sertifikat yang terdiri dari SAN 3 Mataram dan TK Pembina Mataram yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 59 Mataram memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti terlihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2020

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Gedung Kantor :		
Gedung Aula Rinjani	1 lokal	Kondisi bangunan Baik
Gedung Wisma Tambora : - Kamar - Aula - Room (ruang rapat)	73 Kamar 2 lokal 6 lokal	Kondisi bangunan Baik
Gedung Wisma Praja: - Kamar	29 kamar	Kondisi bangunan Baik
Musholla	1 lokal	Kondisi bangunan Baik
Gedung Kelas : - Ruang Kelas - Ruang Widyaiswara - Ruang Makan - Ruang CAT	12 kelas 1 Lokal 1 Lokal 1 Lokal	Kondisi bangunan Baik Kondisi bangunan rusak ringan
Gedung perkantoran	1 lokal	
Kendaraan Dinas		
Kendaraan roda 4	11 bh	Baik
Kendaraan roda 2	15 bh	Tidak baik dan dalam proses penghapusan
Roda 3	1 buah	Baik
Peralatan dan Perlengkapan Kantor:		
Komputer	15 bh	Baik
Laptop	46 bh	Baik
LCD	21 bh	Baik
Mesin genset	2 bh	Baik
Meubelair : - Meja - Kursi	250 bh 750.000 bh	Baik Baik
Pemotong rumput : - Mesin pemotong rumput dorong	2 bh 3 bh	Baik Baik

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
- Mesin pemotong rumput gendong		
Printer	14 bh	Baik

Selain itu, untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai ruang perpustakaan dengan inventaris buku sebanyak kurang lebih 4.854 buah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6

Daftar Inventaris Buku Tahun 2020

Jenis Buku	Jumlah	Satuan
Buku Penelitian	10	Buah
Buku Ilmu Komputer	19	Buah
Buku Bahasa Inggris	21	Buah
Buku Filsafat	17	Buah
Buku Agama	27	Buah
KKP, KKK (Pelatihan Pim III dan Pim IV)	4.125	Buah
Hasil Aktualisasi Nilai-nilai ASN		Buah
Buku Ekonomi	47	Buah
Buku Sosial	54	Buah
Buku Pendidikan	58	Buah
Buku Politik dan Hukum	77	Buah
Buku Pemerintahan	280	Buah
Buku Manajemen	109	Buah
Buku Sejarah	10	Buah

Secara umum nilai aset yang dikelola pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

Nilai Aset yang Dikelola
Per 31 Desember 2020

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)	
1	3	ASET TETAP	67.240.805.942,71
	1	Tanah	2.714.600.000,00
1	01	Tanah	2.714.600.000,00
	2	Peralatan Dan Mesin	5.382.149.300,00
2	01	Alat Besar	22.525.000,00
2	02	Alat Angkutan	2.572.237.500,00
2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00

Kode		Nama Barang	Nilai (Rp)
2	04	Alat Pertanian	9.600.000,00
2	05	Alat Kantor dan Rumah Tanagga	1.826.532.000,00
2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	190.270.000,00
2	07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
2	08	Alat Laboratorium	0,00
2	09	Alat Persenjataan	0,00
2	10	Alat Komputer	629.234.800,00
2	11	Alat Eksplorasi	0,00
2	12	Alat Pengeboran	0,00
2	13	Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	0,00
2	14	Alat Bantu Eksporasi	0,00
2	15	Alat Keselamatan Kerja	0,00
2	16	Alat Peraga	0,00
2	17	Alat Proses/Produksi	0,00
2	18	Rambu-Rambu	0,00
2	19	Alat Olahraga	131.750.000,00
	3	Gedung dan Bangunan	58.362.705.692,71
3	01	Bangunan Gedung	58.140.534.692,71
3	02	Monumen	222.171.000,00
3	03	Bangunan Menara	0,00
3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00
	4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	781.350.950,00
4	01	Jalan dan Jambatan	653.237.950,00
4	02	Bangunan Air	0,00
4	03	Instalasi	98.588.000,00
4	04	Jaringan	29.525.000,00
	5	Aset Tetap lain	0,00
5	01	Bahan Perpustakaan	0,00
5	02	Barang bercorak Kesenian/ Budaya/ Olahraga	0,00
5	03	Hewan	0,00
5	04	Biota Perairan	0,00
5	05	Tanaman	0,00
5	06	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5	07	Aset Tetap dalam Renovasi	0,00
	6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
6	01	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
1	5	ASET LAINNYA	0,00
	2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
2	01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
	3	Aset Tidak Berwujud	0,00
3	01	Aset Tidak Berwujud	0,00
	4	Aset Lain-Lain	0,00
4	01	Aset Lain-Lain	0,00

Sumber Pengurus Barang BPSDMD PROVINSI NTB 2020

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 tercantum Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni “**Mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang Gemilang**”, yang dijabarkan dalam 6 misi yaitu :

1. **Misi pertama, NTB TANGGUH DAN MANTAP,**
2. **Misi kedua, NTB BERSIH DAN MELAYANI ,**
3. **Misi ketiga, NTB SEHAT DAN CERDAS,**
4. **Misi keempat, NTB ASRI DAN LESTARI,**
5. **Misi kelima, NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI,**
6. **Misi keenam, NTB AMAN DAN BERKAH,**

BPSDMD Provinsi Mendukung Visi Kedua yaitu NTB Bersih Melayani yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
VISI, MISI, SASARAN, TUJUAN DALAM RPJMD

Visi	Misi II	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang	NTB Bersih dan Melayani (Transformasi Birokrasi Yang Bersintegritas, Berkinerja, Bersih dari KKN dan Berdedikasi)	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih ,bebas KKN dan Akuntabel.	Meningkatnya Profesionalisme ASN ASN
Indikator Sasaran			
Indeks Profesionalisme ASN			

Sehubungan dengan tabel di atas serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Rencana Setrategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Target
Terwujudnya ASN NTB yang Memiliki Kompetensi	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Tingkat Kompetensi i ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,24 Persen

Dari Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra untuk tahun 2020 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kompetensi ASN	Tingkat Kompetensi ASN	0,24 Persen

Berdasarkan Tabel diatas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatkan Kompetensi ASN	Tingkat Kompetensi ASN	<p>Formulasi Penghitungan :</p> <p>Perhitungan Jumlah bobot Kompetensi ASN perjenis kompetensi bagi Jumlah ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dikali 100%</p> <p>Tipe Penghitungan :</p> <p>Persentasi Perhitungan Bobot Kompetensi ASN</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB</p> <p>Alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pada setiap OPD 2. Pemenuhan minimal 20 JP pertahun bagi ASN untuk mengikuti diklat.

Berdasarkan tabel Indeks Kinerja Utama Tahun 2020 maka Kepala Badan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	MeningkatnyaKompetensi ASN	Tingkat Kompetensi ASN	0,24 Persen

Untuk mewujudkan target kinerja pada tahun 2020 yang diperjanjikan diatas , Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan pada anggaran Perubahan sebesar Rp 29.357.384.000 yang terdiri dari Rp.9.044.010.000 belanja tidak langsung dan Rp.20.313.374.000 belanja langsung. Dari anggaran yang ada BPSDMD melaksanakan Program Pengembangan Kompetensi ASN yang Sasaran Strategisnya Meningkatkan Kompetensi ASN dengan Indikator Tingkat Kompetensi ASN dengan target 0,24%. Dengan Jumlah Anggaran Sebesar

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, BPSDM NTB berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang dilengkapi dengan metodologi pengukuran kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi Pengukuran Kinerja Untuk menjawab Indikator Kinerja Utama sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM NTB Tahun 2020. Maka pengukuran kinerja menggunakan cara/metode pengukuran berdasarkan :

Tabel 3.1
Metoda Penyusunan IKU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Sumber Data			
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi ASN	Tingkat Kompetensi	Dimensi Kompetensi 40%		1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalisme ASN 2. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN		
		Jenis Kompetensi	Pejabat		Pelaksana	Fungsional
		Menejerial	15			15
		Teknis	15		22,5	15
Seminar/Workshop dll	10	17,5	10			

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan Alokasi Anggaran Program sebesar Rp. Rp.15.753.014.465,50 dengan target IPA Dimensi Kompetensi sebesar 0,24%. Anggaran BPSDMD Provinsi NTB ini mengalami refocusing pada tanggal 3 Juni 2020 menjadi Rp 3.554.567.604 atau menurun sebesar 17,44%. Kemudian pada anggaran perubahan BPSDMD mendapatkan alokasi anggaran sebesar 2.447.097.461 atau mengalami penurunan Kembali sebesar 31%. Refocusing anggaran sebagian besar dilaksanakan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial antara lain kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan, Bimtek Lurah, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Kompetensi sedangkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional ada 3 kegiatan yang terrefocusing antara lain Diklat Pembentukan Fungsional POL PP, Diklat Teknis Pengelolaan Kearsipan, dan Pelatihan Dasar Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Berdasarkan data anggaran di atas maka dapat dilihat Perbandingan Target dan Realisasi yang ada sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil pengukuran kinerja tahun Anggaran 2020. Hal ini terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2020

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	2	3	4	5	6
1.	MeningkatnyaKompetensi ASN	Tingkat Kompetensi ASN	0,24%	0,16	60%

Jika dilihat dari tabel tersebut bahwa realisasi belum sesuai dengan target dikarenakan perubahan kondisi sosial masyarakat yang banyak berubah sebab Pandemi Covid- 19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 yang secara langsung berdampak pada anggaran di masing- masing perangkat Daerah.

Oleh karna itu di BPSDMD Provinsi NTB kegiatan Pengembangan Kompetensi diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan kemudian pada pertengahan tahun dimana kondisi Pandemi sudah membaik namun tetap harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Covid-19 yang menimbulkan pola interaksi social baru yang disebut kenormalan baru, namun demikian pelaksanaan kegiatan kediklatan belum dapat terlaksana mengingat sarana prasarana kediklatan dengan kenormalan baru belum tersedia disamping itu banyak kegiatan kediklatan masih belum memiliki regulasi terkait penyelenggaraan melalui Daring sesuai dengan protokol Kesehatan yang menganjurkan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara non klasikal dengan meminimalisir kontak dan tetap melaksanakan protokol kesehatan guna menghindari resiko penyebaran.

Namun demikian perlu diketahui bahwa realisasi yang dicapai BPSDMD Provinsi NTB banyak di pengaruhi oleh ASN Guru yang telah mengikuti pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pembinaanya yakni LPMP. Dari kegiatan Pengembang Kompetensi yang ada di BPSDMD Provinsi NTB hanya dapat menyumbangkan realisasi bobot IPA sebesar 0,03%, hal ini dipengaruhi oleh Refocusing Anggaran sehingga sisa anggaran yang ada hanya dapat membiayai 3 Kegiatan Diklat teknis antara lain Diklat Teknis Analisis Jabatan, Diklat Teknis Evaluasi BSC dan A3 berbasis LFW (logical Fram Work), Diklat Perencanaan dan Penganggaran berbasis kerangka kerja logis .

2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 Tahun 2019 dan Tahun 2018

Bahwa realisasi kinerja pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 karena sesuai Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ada perbedaan cara pencapaian target jika pada tahun 2018 dan 2019 BPSDMD Provinsi NTB menggunakan jumlah peserta yang tersertifikasi sebagai target dengan cara perhitungan membagi jumlah peserta diklat dengan jumlah ASN provinsi NTB yang ada namun pada 2020 BPSDM menjadikan persentasi Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi Sebagai Target yang kemudian melakukan perhitungan dengan membagi jumlah bobot Kompetensi ASN yang ada dengan jumlah ASN yang ada. Kondisi ini mengingat adanya perbedaan tujuan yang terdapat pada Renstra tahun sebelumnya yang kemudian di rubah pada review Renstra 2019-2023. Jika pada tahun 2019 target di tentukan berdasarkan jumlah ASN yang bersertifikat berbeda dengan pada tahun 2020 bahwa dalam penentuan target ditentukan oleh Indikator IPA Dimensi Kompetensi dimana IPA dimensi Kompetensi baru dapat di terapkan

pada 2021 setelah dilakukan perhitungan bersama dengan BKD Provinsi NTB yang menggiring 3 Dimensi lainnya antara lain Dimensi Kualifikasi, Dimensi Disiplin dan Dimensi Kinerja.

3. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Setrategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Renstra Tahun 2020**

NO	Program	Sasaran Program	Program/Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja			Capaian	Ket
				Uraian	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi ASN	Program Peningkatan Mutu Suber Daya Apratur	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	0,24 persen	0.03persen	12.5% Persen	
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Prajabatan	Jumlah Peserta Prajabatan	400	-	0 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	Jumlah Pimpinan Tinggi , PKA dan PKP yang mengikuti Kompetensi Manajerial	170	-	0 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Jumlah Pimpinan Daerah yang memenuhi standar Kompetensi Jabatannya	10	-	0 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional yang mengikuti Kompetensi Fungsional	120	30	25 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Tekhnik Umum dan Kompetensi Pilihan jabatan Administrasi	240	30	13 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Tekhnik Inti Pelayanan Dasar Pilihan dan Kompetensi Tekhnis Inti Non Pelayanan Dasar	361	60	17 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi Tekhnis Pilihan	120	22	18 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	45	35	78 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Tersusunnya dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi	60	108	135 Persen	Dapat dilaksanakan dengan pola daring sehingga memungkinkan untuk dapat mengakomodir lebih banyak peserta
			Terlaksananya Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Peserta Bimtek	30	30	100 Persen	Dapat dilaksanakan dengan pola pembelajaran daring

NO	Program	Sasaran Program	Program/Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja			Capaian	Ket
				Uraian	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi	4	14	350 Persen	Dapat dilaksanakan dengan pola daring

Sumber: BPSDMD Provinsi NTB, 2020

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Renstra Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentasi
1	2	3	4	5	6
2	Terlatihnya CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latsar	Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah	1119 orang	1133 Orang	101%
3	Terlatihnya ASN yang kompeten dalam jabatan struktural	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah	80 Orang	80 Orang	100%
4	Terlatihnya ASN yang kompeten dalam jabatan pimpinan tinggi	Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah	10 Orang	14 Orang	140%
5	Terwujudnya ASN yang kompeten dalam jabatan fungsional	Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah	30 Orang	30 Orang	100%
6	Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang teknis kompetensi umum	Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah	30 Orang	90 Orang	300%
7	Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang teknis kompetensi inti jabatan administrasi	Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah	30 Orang	90 Orang	300%
8	Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang	Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang	60 Orang	85 Orang	141,6 %
9	Terwujudnya ASN yang lulus uji kompetensi	Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah	140 Orang	140 Orang	100%
10	Terwujudnya tenaga pengembang yang kompeten	Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	3 Dok	3 Dok	100%
11	Terlaksananya pengelolaan sumber belajar	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	30 Orang	30 Orang	100%
12	Terwujudnya ASN yang mengikuti karya ilmiah, Orasi Ilmiah, seminar, temu ilmiah, Pengukuhan, FGD, WorkShop, Rakor	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	4 Orang	4 Orang	100%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan pada Renstra menunjukkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jauh dari Target yang telah ditentukan yakni target yang ditentukan sebesar 0,24% namun yang dapat terealisasi hanya 0,03% dengan capaian tidak lebih dari 20% yakni sebesar 12,5% ,hal ini mengingat kondisi pada tahun 2020 yang belum memungkinkan untuk BPSDMD dapat meraih kinerja sesuai dengan yang telah ditargetkan karna banyaknya hambatan pada tahun 2020 yang sangat mempengaruhi BPSDMD antara lain Pandemi yang melanda Dunia yang secara langsung memberi dampak buruk pada ekonomi serta berpengaruh pada perubahan social masyarakat yang ada namun demikian kondisi pada tahun ini akan di jadikan suatu pembelajaran bagi BPSDMD Provinsi NTB untuk dapat beradaptasi dan lebih efektif dalam mencapai tujuan "Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara" .

4. Analisis Penyebab Keberhasilan Alternative solusi yang telah dilakukan.

Realisasi kinerja Badan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari target yang ditentukan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Jauh dari Target yang telah ditentukan yakni 0,24% sedangkan terealisasi hanya 0,03 dengan capaian hanya 12,5% hal ini banyak disebabkan oleh kondisi Pandemi Covid -19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020, yang menempatkan BPSDMD sebagai Lembaga yang harus bertransformasi dalam melakukan pelayanannya adanya capaian pada tahun yang sulit untuk dilakukan oleh BPSDMD banyak di pengaruhi oleh hal-hal berikut :

1. BPSDMD mampu beradaptasi lebih awal dengan kondisi Pandemi Covid yang melanda pada awal tahun.
2. BPSDMD terus melakukan perbaikan pola pembelajaran yang akan diterapkan dalam Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dengan mengikuti kenormalan baru.
3. Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTB terus meningkatkan Kompetensi yang dimiliki untuk lebih inovatif dalam menyiapkan bahan ajar yang mampu diakses secara baik dengan pola Klasikal maupun Non Klasikal.

Berdasarkan uraian faktor pendukung keberhasilan dimasa Pandemi diatas maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah akan melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan capaian yang telah di dapatkan pada tahun selanjutnya,berikut beberapa hal yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana kediklatan non klasikal yang akan mendukung kegiatan dimasa kenormalan baru saat ini dengan memaksimalkan pola-pola pembelajaran daring dan Menyusun pola pembelajaran dengan memperhatikan protokol Kesehatan yang ada.
2. Peningkatan program fasilitasi baik kegiatan kediklatan maupun sertifikasi.
3. Perperencanaan kediklatan yang lebih baik dan proporsional baik dari segianggaran maupun pengembangan kediklatan sesuai dengan standar mutu Imstansi Pembina.
4. Koordinasilebihintensdengan TAPD dalam hal kesepahaman tentang porsi penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian target program unggulan Kepala Daerah salah satunya Menejemen Talenta yang salah satu pengeraknya adalah BPSDMD Provinsi NTB.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Kediklatan untuk pelayanan yang lebih baik terutama dalam penguasaan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat .

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penggunaan sumber daya tentunya ada efisiensi tertentu yang dapat dilakukan BPSDMD dalam meyenggarakan kegiatan ditengah masa pandemic yaitu dengan di terapkannya social distancing dan Protokol Kesehatan di tengah masyarakat memaksa BPSDMD untuk dapat menyesuaikan kondisi yang ada dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam setiap kegiatannya yang secara otomatis banyak menghemat penggunaan SDM yang harus melakukan kontak langsung dengan Peserta Pengembangan Kompetensi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai institusi pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengawal proses Reformasi Birokrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik, berupa pelatihan Teknis, Manajerial maupun Fungsional, Sertifikasi Kompetensi, Workshop, Seminar dst. Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi ASN ini dilaksanakan melalui Program Prioritas Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2020

NO	Program	Sasaran Program	Program/Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja			Capaian	Ket
				Uraian	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi ASN	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	0,24 persen	0.03persen	12.5% Persen	
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Prajabatan	Jumlah Peserta Prajabatan	400	-	0 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	Jumlah Pimpinan Tinggi, PKA dan PKP yang mengikuti Kompetensi Manajerial	170	-	0 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Jumlah Pimpinan Daerah yang memenuhi standar Kompetensi Jabatannya	10	-	0 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional yang mengikuti Kompetensi Fungsional	120	30	25 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Tekhnik Umum dan Kompetensi Pilihan jabatan Administrasi	240	30	13 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Tekhnik Inti Pelayanan Dasar Pilihan dan Kompetensi Tekhnis Inti Non Pelayanan Dasar	361	60	17 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi Tekhnis Pilihan	120	22	18 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	45	35	78 Persen	Tidak dapat terlaksana Krna Pndemi Covid-19
			Tersusunnya dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi	60	108	135 Persen	Dapat dilaksanakan dengan pola daring sehingga memungkinkan untuk dapat mengakomodir lebih banyak peserta

NO	Program	Sasaran Program	Program/Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja			Capaian	Ket
				Uraian	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terlaksananya Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Peserta Bimtek	30	30	100 Persen	Dapat dilaksanakan dengan pola pembelajaran daring
			Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi	4	14	350 Persen	Dapat dilaksanakan dengan pola daring

Sumber: BPSDMD Provinsi NTB, 2020

Penurunan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal 2020 yang secara kehidupan social dan ekonomi. Dari sisi social ekonomi ini menjadi suatu tantangan besar bagi BPSDMD Provinsi NTB untuk dapat melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan lebih inovatif dan sesuai dengan Protokol Kesehatan tentunya sehingga secara otomatis akan mengefisiensi pelaksanaan yang awalnya selalu dengan pola klasikal menjadi pola daring. Dari segi ekonomi kondisi pandemik sangat berpengaruh mengingat adanya keterbatasan social bagi masyarakat untuk berinteraksi tentu mempengaruhi ekonomi secara luas yang tentunya berpengaruh juga pada kondisi keuangan Negara dan Daerah yang sebagian besar anggarannya harus dialokasikan untuk penanganan dampak bencana Non alam.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Anggaran Belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 10.678.389.000,- jumlah ini jauh berbeda dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebelumnya disebabkan oleh Refocusing anggaran yang menjadi akibat ekonomi dari Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 . dari anggaran yang ada terealisasi sebesar Rp. 15.224.468,116,- (88.89%) yang terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.678.389.000,- terealisasi sebesar Rp. 10,253,879,523 (96.02%) - Belanja Langsung sebesar Rp. 6.448.305.807,- terealisasi sebesar Rp. 4.970,588,593(77,08%). Program prioritas dalam rangka mencapai sasaran “Meningkatnya Kompetensi ASN ”, adalah Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.447.101.461, realisasi sebesar Rp. 1,440,185,869 atau 48.85 persen dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran		
		Uraian	Target	Realisasi s.d TW. IV 2020		(Rp)	Realisasi s.d TW. IV 2020	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
16	Meningkatnya mutu sumber daya aparatur	1. Persentasi Kompetensi Manajerial 2. Persentasi Kompetensi Fungsional 3. Persentasi Kompetensi Teknis 4. Persentasi Pejabat Fungsional	0,24 Persen	0,03 Persen	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2.447.101.461	1.440.185.869	58,85

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran		
		Uraian	Target	Realisasi s.d TW. IV 2020		(Rp)	Realisasi s.d TW. IV 2020	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		yang Tersertifikasi						
16.01	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Prajabatan	Jumlah Peserta Prajabatan	400	-	01. pengembangan kompetensi prajabatan	119,618,200	67,355,970	56.31
16.02	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	Jumlah Pimpinan Tinggi , PKA dan PKP yang mengikuti Kompetensi Manajerial	170	-	02. pengembangan kompetensi kepemimpinan	90,372,200	61,801,700	68.39
16.03	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Jumlah Pimpinan Daerah yang memenuhi standar Kompetensi Jabatannya	10	-	03. Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah	156,930,200	38,719,100	24.67
16.04	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional yang mengikuti Kompetensi Fungsional	120	30	04. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	495,537,700	354,962,600	71.63
16.05	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Teknik Umum dan Kompetensi Pilihan jabatan Administrasi	240	30	05. Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	230,319,674	111,297,987	48.32
16.06	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Teknik Inti Pelayanan Dasar Pilihan dan Kompetensi Tekhnis Inti Non Pelayanan Dasar	361	60	06. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	176,660,600	125,770,496	71.19
16.07	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi Tekhnis Pilihan	120	22	07. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	144,843,800	57,095,100	39.42
16.08	Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	45	35	08. Sertifikasi Kompetensi	114,007,930	47,628,430	41.78
16.09	Tersusun\nya dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi	60	108	09. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	294,232,800	127,440,715	43.31
16.10	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Peserta Bimtek	30	30	10. Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	94,479,300	49,605,210	52.50

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran		
		Uraian	Target	Realisasi s.d TW. IV 2020		(Rp)	Realisasi s.d TW. IV 2020	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
16.11	Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi	4	14	11. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	530,099,057	398,508,561	75.18

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa ada efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan beberapa program kegiatan yang dapat terlaksana pada akhir tahun anggaran namun demikian ada juga beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan SPD kegiatan tersebut tidak dapat diterbitkan mengingat kondisi Keuangan Daerah yang masih belum membaik akibat Pandemi Covid-19, rincian akan efisiensi anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kompetensi, alokasi anggaran sebesar Rp. 294,232,800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 127,440,715 atau (43.31 %) efisiensi anggaran pada kegiatan ini karna ada pergeseran pola pelaksanaan dengan non klasikal (daring) yang akhirnya mengurangi biaya penyelenggaraan.
2. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme, alokasi anggaran sebesar Rp. 530,099,057 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 398,508,561 atau (75.18 %) efisiensi anggaran pada kegiatan ini karna ada pergeseran pola pelaksanaan dengan non klasikal (daring) yang akhirnya mengurangi biaya penyelenggaraan..

Dari penjelasan di atas berikut beberapa permasalahan yang timbul pada tahun 2021 terkait anggaran beserta solusi yang dapat dilaksanakan. Dalam tahun anggaran 2020, pada program ini telah dialokasikan anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 2.447.101.461 dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.440.185.869 dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 58,85%, sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 24% dan outcome sebesar 100%. Adapun pelaksanaan program ini yang terbagi dalam 11 kegiatan pelatihan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 119.618.200,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.67.355.970,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 56,31% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 0% dan outcome 0%.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan pada tahun 2020 tidak dapat terlaksana baik secara online maupun offline, hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2020 adanya wabah covid 19 yang melanda Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. Pandemi covid 19 ini juga menyebabkan test SKB dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2020 menjadi tertunda, pengalihan anggaran pada anggaran perubahan juga tidak dapat dilaksanakankarena anggaran diklat ini sebagian besar difocusing untuk membiayai kebutuhan covid 19. Adapun realisasi keuangan yang telah terealisasi digunakan untuk membiayai kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2021 ke BKPSDM Kab/Kota se NTB, sedangkan untuk perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke LAN RI di Jakarta terkait

persiapan pelaksanaan Latsar TA. 2020. Perjalanan konsultasi ini dilaksanakan pada bulan Maret sebelum pemberlakuan PSBB terkait Covid dan sebelum refofusing anggaran dilakukan.

Walaupun tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBD pada BPSDM Daerah Provinsi NTB pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Prajabatan tetap melaksanakan kegiatan berupa:

- Memfasilitasi kegiatan Pelatihan Latsar Kabupaten Dompu dengan Pola Kerjasama, dengan sasaran sebanyak 186 orang. Pelaksanaan Pelatihan Latsar Kabupaten Dompu ini dilaksanakan pada BulanMaret 2020.
- Memfasilitasi seminar akhir Pelatihan Latsar Kabupaten Bima sebanyak 89 orang. Seminar akhir ini dilaksanakan pada bulan April 2020 dengan metode daring (zoom meeting).
- Menyusun adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Sekretaris Daerah bagi Kabupaten/Kota yang menganggarkan kegiatan Latsar dengan Pola Kontribusi untuk Tahun Anggaran 2021.

2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.372.200,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.61.801.700,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 68,39% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 0% dan outcome 0%.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan pada tahun 2020 tidak dapat terlaksana, hal ini disebabkan karena adanya wabah covid 19, sehingga anggaran pada kegiatan ini dilakukan refocusing. Adapun rencana kegiatan yang semula akan dialihkan pada anggaran perubahan tahun 2020 yaitu Bimbingan Teknis bagi Lurah se Pulau Lombok sebanyak 30 orang. Namun kegiatan ini tetap tidak dapat terlaksana karena SPD (surat pencairan dana) pada kegiatan ini tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya oleh BPKAD Provinsi NTB, melihat kondisi keuangan pada kas daerah yang tidak dapat memenuhi seluruh anggaran belanja pada masing – masing OPD. Adapun realisasi keuangan yang telah terealisasi digunakan untuk membiayai kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Diklat PKA,PKM dan PKN II Tahun Anggaran 2021 ke BKPSDM Kab/Kota se Pulau Lombok sedangkan perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke LAN RI dan LAN Jatinangor Bandung terkait persiapan pelaksanaan terkait persiapan pelaksanaan PKA,PKP, PKN II dan persiapan akreditasi PKN II untuk tahun 2020, perjalanan luar daerah ini dilaksanakan bulan Januari sd Maret sebelum pemberlakuan PSBB terkait Covid dan sebelum refofusing anggaran dilakukan.

Walaupun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan pada tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Memfasilitasi kegiatan PKN II Kementrian Kesehatan RI sebanyak 60 peserta dengan pelaksanaan via daring (zoom meeting) dimana alokasi kegiatan adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pemerintahan Desa dan Pencatatan Sipil, BKBPP, Dinas Tenaga Kerja, DLHK Provinsi NTB. Pelaksanaan bulan Agustus 2020.
- Memfasilitasi Stula kegiatan PKP Provinsi Riau sebanyak 40 peserta dengan pelaksanaan via daring (zoom meeting) dimana lokus kegiatan adalah Bapedda, BPSDMD, Inspektorat Provinsi NTB. Pelaksanaan bulan Oktober 2020.
- Menyusun Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Sekretaris Daerah bagi Kabupayen/Kota yang menganggarkan kegiatan PKP, PKA dan PKN dengan Pola Kontribusi untuk TA 2021.

- Membuat surat Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar tahun 2021 ke LAN RI dengan Nomor Surat :800/749/BPSDMD-PKM/2020 tanggal 23 November 2020.

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 156.930.200,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.38.719.100,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 24,67% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 0% dan outcome 0%.

Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan pada tahun 2020 yang direncanakan untuk Bimtek Lurah se NTB dan Pembekalan Kepribadian Istri DPRD Provinsi NTB tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena anggaran pada kegiatan ini direfocusing untuk anggaran covid 19 dan SPD (surat pencairan dana) kegiatan ini tidak dapat dikeluarkan.

Adapun realisasi keuangan yang telah terealisasi digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan pada bulan Februari 2020 dalam rangka Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Lurah ke Biro Pemerintahan Setda Kab/Kota se Pulau Lombok terkait permintaan informasi dan masukan jumlah Lurah dan materi yang ingin didapatkan pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis. Untuk perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke BPSDM Kemendagri terkait pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Lurah, dan Study Komperatif ke BPSDM Provinsi Bali terkait pelaksanaan dan penganggaran PKN II di BPSDM Provinsi Bali, perjalanan luar daerah ini dilaksanakan bulan Januari sd Maret sebelum pemberlakuan PSBB terkait Covid dan sebelum refofusing anggaran dilakukan.

Kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan dengan menggunakan APBDP BPSDM Daerah Provinsi NTB antara lain :

- Memfasilitasi Kunjungan Kerja Komisi I DPRD KSB.
- Memfasilitasi Pendalaman Tugas Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima berupa RAB Kegiatan, Jadwal Kegiatan.
- Melakukan Monitoring dan Monev kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kota Bima di Hotel Grand Legi tanggal 9 November 2020.

4) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 495.537.700,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.354.962.600,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 71,63% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 25% dan outcome 100%.

Realisasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional tahun 2020 yaitu terlaksananya Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli dengan peserta 30 orang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s.d 21 Maret 2020. Peserta Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli berasal dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Adapun rencana kegiatan yang akan dialihkan dan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2020, tetap tidak dapat terlaksana karena SPD (surat pencairan dana) pada kegiatan ini tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya oleh BPKAD Provinsi NTB, melihat kondisi keuangan pada kas daerah yang tidak dapat memenuhi seluruh anggaran belanja pada masing – masing OPD.

5) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 230.319.674,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.111.297.987,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 48,32% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 12,5% dan outcome 100%.

Realisasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi tahun 2020 untuk sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi yaitu Diklat Analisis Jabatan Angkatan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta 30 orang yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari s.d 03 Maret 2020. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat dalam SPD (Surat Penyediaan Dana).

Realisasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi tahun 2020 tidak ada yang terlaksana. Diklat Teknis Pengelolaan Kearsipan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s.d 3 April 2020 tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi Covid-19, dan terbitnya Surat Edaran Gubernur NTB Nomor : 360/170/BPBD/III/2020, tanggal 22 Maret 2020, perihal Kewaspadaan Segenap Komponen, Masyarakat NTB dalam Penanganan Covid-19 maka kegiatan diklat ditunda.

Pelaksanaan Kegiatan di jadwalkan tanggal 20 s.d 24 Oktober 2020 tetapi pelaksanaan diklat tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran untuk pelaksanaan tidak tersedia dalam SPD (Surat Penyediaan Dana).

6) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib non Pelayanan Dasar

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 176.660.600,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.125.770.496,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 71,19% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 16,6% dan outcome 100%.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2020 pada target RENSTRA tahun 2019 – 2023 berjumlah 361 orang sedangkan di DPAP tahun 2020 berjumlah 60 orang. Realisasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2020 untuk Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar yaitu terlaksananya Diklat Evaluasi Kinerja BSC dan A3 Berbasis Logical Frame Work Analysis (LFA) pada tanggal 2-6 Nopember 2020, jumlah peserta 30 orang, dengan anggaran Rp.90.323.550 terealisasi Rp. 65.253.498 atau 72,24% sedangkan untuk Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar yaitu terlaksananya Diklat Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kerangka Kerja Logis pada 19-23 Oktober 2020 jumlah peserta 30 orang dengan anggaran Rp. 86.337.050 terealisasi Rp. 60.566.998 atau 70,15 %. Seluruh kegiatan yang direncanakan pada APBD Perubahan dapat dilaksanakan dengan baik hanya terjadi perubahan metode pembelajaran dan beberapa item kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat pada SPD yang baru sehingga menyebabkan Anggaran yang semula telah ditetapkan untuk item tersebut tidak dapat direalisasikan dan menjadi SILPA.

7) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 144.843.800,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.57.095.100,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 39,42% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 18,3% dan outcome 100%.

Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Perangkat Daerah Penunjang yaitu terlaksananya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 angkatan pada tanggal 24 Februari s.d 5 Maret 2020 jumlah peserta 30 orang. Kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Perangkat Daerah Penunjang tahun 2020 pada target RENSTRA tahun 2019 – 2023 berjumlah 120 orang, sedangkan pada DPAP tahun 2020 target berjumlah 60 orang (Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 2 (dua) Angkatan. Target tidak tercapai karena, tidak terlaksananya Diklat Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Angkatan II karena SPD (Surat Pencairan Dana) pada kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan.

8) Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 144.007.930,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.47.628.430,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 41,78% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 80% dan outcome 100%.

Realisasi Kegiatan Sertifikasi Kompetensi tahun 2020 yaitu Jumlah Uji Kompetensi Pejabat fungsional Polisi Pamong Praja berjumlah 36 orang berasal dari Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 27 orang, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 4 orang dan Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebanyak 5 orang. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 s.d 25 Nopember 2020 secara online.

Untuk Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi di pusatkan di Ruang CAT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan untuk Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa dilaksanakan di Kantor masing-masing.

Rapat Pleno penetapan hasil Uji Kompetensi dilaksanakan setelah semua proses Uji Kompetensi dilaksanakan. Rapat Pleno dipimpin oleh Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Kemneterian Dalam Negeri RI. Berdasarkan hasil Penilaian semua materi Uji Kompetensi dari 36 orang Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja yang mengikuti Uji Kompetensi 35 orang Peserta dinyatakan Kompeten/Lulus dan 1 orang dinyatakan belum kompetensi/Tidak lulus.

9) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 294.232.800,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.127.440.715,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 43,31% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 161.6% dan outcome 100%.

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi tahun 2020 terdiri dari :

- **Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi melalui Pelatihan/Workshop/Seminar.**

- **Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar PKN Tingakt II**

Dalam upaya peningkatan kompetensi Widyaiswara sebagai tenaga pengembang kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta persiapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat melaksanakan Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II, tahun 2020 melalui Sub Bidang Pengelolaan kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi melaksanakan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Workshop Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dilakukan dalam rangka mempersiapkan tenaga pengembang kompetensi dalam hal ini widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk terpenuhinya kompetensi widyaiswara untuk dapat memenuhi syarat menjadi narasumber/ Fasilitator/pengampu materi pada pelaksanaan Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Workshop Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 10 sampai dengan 11 Desember 2020 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di fasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Pola Full E-Learning.

- **Workshop Penyiapan Tenaga pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).**

Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dilakukan dalam rangka mempersiapkan tenaga pengembang kompetensi dalam hal ini widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk terpenuhinya kompetensi widyaiswara untuk dapat memenuhi syarat menjadi narasumber/ Fasilitator/pengampu materi pada pelaksanaan Pelatihan kepemimpinan Administrator. Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 kali pelaksanaan yaitu Tahap I dilaksanakan mulai tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 dan Tahap II dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 25 Desember 2020.

Adapun pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahap I yang dilaksanakan tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 diikuti oleh 15 orang Peserta yang berasal dari 14 Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB dan 1 orang Widyaiswara dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi. sedangkan Pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrasi yang dilaksanakan dari tanggal 12 s.d 25 Desember diikuti ole 8 orang Widyaiswara yang seluruhnya merupakan Pejabat fungsional Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jadi untuk Tahun 2020 jumlah Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mengikuti Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrasi sebanyak 23 orang Widyaiswara.

- **Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).**

Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dilakukan dalam rangka mempersiapkan tenaga pengembang kompetensi dalam hal ini widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk terpenuhinya kompetensi widyaiswara untuk dapat memenuhi syarat menjadi narasumber/ Fasilitator/pengampu materi pada pelaksanaan Pelatihan kepemimpinan Pengawas.

Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 kali pelaksanaan yaitu Tahap I dilaksanakan mulai tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 dan Tahap II dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 25 Desember 2020.

Adapun pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahap I yang dilaksanakan tanggal 20 April s/d 6 Mei Mei 2020 diikuti oleh 10 orang Peserta yang berasal dari 9 orang Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB dan 1 orang Widyaiswara dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kementerian Pertanian. Sedangkan Pelaksanaan Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahap II yang dilaksanakan dari tanggal 12 s.d 25 Desember diikuti oleh 10 orang Widyaiswara yang seluruhnya merupakan Pejabat fungsional Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jadi untuk Tahun 2020 jumlah Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mengikuti Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 20 orang Widyaiswara.

- **Workshop Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).**

Workshop Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan bagi Manajemen dan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Hal ini juga sebagai bagian penting dalam akreditasi program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Workshop Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 20 sampai dengan 24 April 2020 yang diikuti oleh 32 orang peserta yang berasal dari unsur Manajemen selaku penyelenggara kegiatan pelatihan.

- **Pelaksanaan Akreditasi**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 telah mengajukan untuk dilakukan proses akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil siding akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 26 Nopember 2020 bahwa untuk akreditasi Lembaga Pelatihan diperpanjang waktunya sampai dengan Februari 2021. Sehingga Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih bisa melengkapi bahan-bahan yang masih kurang paling lambat akhir Januari 2021.

Sesuai dengan hasil sidang Tim Akreditasi Lembaga Administrasi Negara terkait perpanjangan masa proses pelaksanaan akreditasi untuk Lembaga penyelenggara pelatihan yang diperpanjang sampai Pebruari 2021 maka langkah yang ditempuh untuk dapat melengkapi bahan-bahan yang masih kurang adalah dengan membentuk Tim Penyusunan Bahan Akreditasi Lembaga Pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan proses Akreditasi terhadap Akreditasi Lembaga Pelatihan, Akreditasi Program Pelatihan PKN Tingkat II dan Akreditasi Program Program Pelatihan PBJ.

- **Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II**

Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II diajukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan agar pada tahun 2021 dapat melaksanakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II secara mandiri. Berdasarkan hasil sidang Tim Akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara tanggal 26 Nopember 2020, hasil Penilaian Akreditasi untuk Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah "Tidak terakreditasi dengan Nilai 57,43." Hasil tersebut diperoleh karena banyaknya berkas-berkas yang diminta sebagai bagian dari penilaian akreditasi belum bisa terpenuhi khususnya terkait dengan berkas penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2017 dan 2019 yang memang penyelenggaranya adalah lembaga Administrasi Negara LAN sedangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB hanya kebagian sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan.

- **Akreditasi Program Pelatihan Barang/Jasa**

Pelatihan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Lembaga yang telah tersertifikasi sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan barang/jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri) dengan sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : TUK-089-099 Tanggal 12 Agustus 2019 dengan masa berlaku sampai dengan 12 Agustus 2023. Sedangkan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara Pelatihan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah berakhir pada tanggal 1 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Agar Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap dapat melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Uji Kompetensi bagi peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan usulan untuk Re-Akreditasi. Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Kepala pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan surat Nomor 800/511/BPSDMD/2020 tanggal 29 September 2020.

Pengajuan Re-Akreditasi tersebut sedikit agak terlambat hal ini sebagai pengaruh dari sistem kerja akibat pengaruh bencana non alam yaitu covid-19, Hal ini juga berpengaruh

kepada pelaksanaan kegiatan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9860/D.3.3/09/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa.

Berdasarkan hasil konsultasi terakhir dengan Panitia Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa proses akreditasi akan dilanjutkan pada tahun 2021 untuk kegiatan fisitasi yang akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2021.

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai 43,31 % dengan realisasi fisik 100 %, di mana target pada kegiatan ini juga lebih kecil dibandingkan dengan realisasinya yaitu Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi melalui Pelatihan/Workshop/Seminar sejumlah 110 orang dengan target 60 orang, hal ini disebabkan karena Pelatihan/Workshop/Seminar sebagian besar dilaksanakan dengan metode E Learning sehingga pengeluaran bisa lebih di efisiensi.

10) Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 94.479.300,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.49.605.210,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 52,5% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 93,3% dan outcome 100%.

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama pada Tahun 2020 meliputi :

- **Peningkatan Kompetensi Widyaiswara melalui Workshop**

Pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan pada Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan kerjasama memprogramkan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh widyaiswara dan manajemen melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning.

Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 23 sampai dengan 25 Nopember 2020 bertempat di Wisma Tambora Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Narasumber pada kegiatan Workshop adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar sebanyak 28 orang yang terdiri dari unsur Widyaiswara dan Manajemen.

- **Kerjasama dengan Kabupaten/Kota meliputi**

- **Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama**

Pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan kelembagaan pada Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama menyusun Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun Maksud dan Tujuan dibuat Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama antara Para Pihak (Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota)

dalam rangka Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan menjalin hubungan kerjasama kelembagaan antara Para Pihak (Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Jumlah Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Para Pihak (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk Tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) Kesepakatan Bersama.

- **Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama**

Naskah Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut atas telah ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2020 baru dilakukan dengan 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Dompu yaitu Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2020.

- **Pengelolaan Perpustakaan**

Salah satu tugas dan Fungsi yang ada pada Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama adalah Pengelolaan Perpustakaan yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sampai dengan saat ini jumlah Bahan Pustaka yang dikelola oleh Perpustakaan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 9.145 Eksmlar dengan 17 Jenis Bahan Pustaka dan 4.967.

Dari jumlah tersebut tambahan bahan pustaka pada tahun 2020 sebanyak 672 eksemplar terdiri dari 407 buku dan 265 Laporan Aktualisasi Pelatihan Prajabatan.

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai 52,50 % dengan realisasi fisik 100 %, hal ini karena pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning ini ada beberapa kegiatan pendukung pelaksanaan bimtek yang tidak sesuai dengan perencanaan akibat covid 19 yaitu biaya perjalanan dinas narasumber yang seharusnya orang menjadi 1 orang dan makan minum kegiatan yang seharusnya untuk 5 hari menjadi 3 hari.

11) Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme tahun 2020 merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi Sub. Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi. Di mana dalam kegiatan ini terpusat pada kegiatan pengembangan kompetensi widyaiswara BPSDM Provinsi NTB.

Tenaga Pengembang Kompetensi Widyaiswara merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik untuk pelatihan Manajerial, Teknis dan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultur dan lain sebagainya.

- a. **Widyaiswara Berdasarkan Jenjang Jabatan.**

Sampai dengan Akhir Desember 2020 Jumlah Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak

30 (tiga Puluh). Berdasarkan Jenjang Jabatan masing-masing Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Orasi Ilmiah Widyaiswara

Orasi Ilmiah sebagai syarat untuk menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat Kemenristekdikti. Di mana dalam orasi ilmiah ini dilakukan pengukuhan bagi Widyaiswara Ahli Utama sebagai wujud akademis atas jabatan yang dipangkunya. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa Widyaiswara yang akan menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Utama dan Widyaiswara yang pengangkatannya berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berkewajiban untuk melaksanakan orasi ilmiah.

Widyaiswara yang diwajibkan untuk mengikuti orasi Ilmiah adalah Widyaiswara yang diangkat melalui jalur inpassing yang pengangkatannya dari Pejabat Pimpinan Tinggi dan diangkat dalam jabatan Widyaiswara Ahli Utama serta Widyaiswara Ahli Madya yang akan naik Jabatan ke Widyaiswara Ahli Utama. Sampai dengan bulan Desember 2020 Jumlah Widyaiswara yang belum menyelesaikan orasi ilmiah sebanyak 15 orang terdiri dari Widyaiswara yang pengangkatannya melalui Inpassing jabatan Pimpinan Tinggi dan diangkat dalam jabatan Widyaiswara Ahli Utama sebanyak 5 orang serta Widyaiswara Ahli Madya yang akan naik jenjang Jabatan ke Widyaiswara Ahli Utama sebanyak 10 orang.

Realisasi Kegiatan pada Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme tahun 2020 antara lain :

- **Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Profesi Widyaiswara Berupa Pelatihan Penjenjangan Kewidyaiswaraan**

Sesuai amanat Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, “ Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, Widyaiswara yang akan naik jenjang jabatan, harus mengikuti dan lulus Diklat Penjenjangan Widyaiswara dan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi melalui pelatihan dalam hal ini Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengikut sertakan Widyaiswara untuk mengikuti beberapa pelatihan pada tahun 2020.

- **Pelatihan/Workshop/ Teknis/Fungsional di Luar Daerah**

Untuk meningkatkan kompetensi Widyaiswara sebagai tenaga pengembang kompetensi perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional dalam upaya mendukung kompetensi widyaiswara dalam mengampu materi pelajaran. Kegiatan Pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional bagi widyaiswara disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki untuk mengampu suatu materi pelatihan.

Widyaiswara yang mengikuti Pelatihan/Workshop teknis dan/atau fungsional tahun 2020 di luar daerah sebanyak 4 (empat) Orang. Adapun pelatihan teknis dan/atau fungsional yang diikuti antara lain :

- Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

- o Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan kepemimpinan Pengawas)

- **Pelatihan/Workshop/ Teknis/Fungsional di Luar Daerah**

Untuk meningkatkan kompetensi Widyaiswara sebagai tenaga pengembang kompetensi perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional dalam upaya mendukung kompetensi widyaiswara dalam mengampu materi pelajaran. Kegiatan Pelatihan/Workshop teknis dan atau fungsional bagi widyaiswara disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki untuk mengampu suatu materi pelatihan.

Widyaiswara yang mengikuti Pelatihan/Workshop teknis dan/atau fungsional tahun 2020 di luar daerah sebanyak 4 (empat) Orang. Adapun pelatihan teknis dan/atau fungsional yang diikuti antara lain :

- o Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- o Workshop Penyiapan Tenaga Pengajar Pelatihan kepemimpinan Pengawai.

Permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 melalui dana APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Rekapitulasi Masalah dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
'Refocusing anggaran pada tahun 2020 mengakibatkan berkurangnya anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan.	Menyesuaikan kegiatan dengan anggaran dan Merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya
Pembatalan beberapa kegiatan di masa pandemi covid 19 (PSBB) sehingga beberapa kegiatan dan konsultasi tertunda	koordinasi, konsultasi dan kegiatan kediklatan dilakukan dengan sistem daring.
Target RENSTRA yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran pada DPA sehingga capaian program kegiatan tidak tercapai	Menyesuaikan kegiatan dengan anggaran
'SPD (Surat Pencairan Dana) yang terbit dari BPKAD tidak sama dengan yang ada pada anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana	Merencanakan ulang kegiatan tersebut pada penganggaran berikutnya dan berkoordinasi dengan BPKAD terkait pencairan SPD

Sumber: BPSDM Provinsi NTB, 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dalam menjabarkan visi, misi dan strategi Kepala Daerah sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum bahwa banyak kegiatan yang belum dapat terselenggara pada tahun 2020 mengingat pandemik yang banyak berdampak pada kondisi ekonomi dan social masyarakat. Dari 11 kegiatan yang telah direncanakan ada beberapa kegiatan yang pada tahun ini sama sekali tidak dapat terlaksana mengingat kondisi pandemic yang melanda pada awal tahun yang kemudian harus di undur antara lain : kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan yang awalnya telah direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan 3 dengan estimasi perekrutan CPNS yang selesai pada triwulan 2 harus ditunda karna banyak pertimbangan kemudian selanjutnya ada kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan yang tidak dapat terlaksana karna pandemik selain itu ada kegiatan pengembangan kompetensi pimpinan tinggi yang sudah kembali di anggarkan pada APBDP namun tetap tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak diterbitkannya SPD karena kondisi keuangan daerah yang belum kondusif karna pandemic yang melanda.

Selain dari tiga indikator di atas masih ada indikator kegiatan yang masih dapat terlaksana pada tahun 2020 dengan pola pembelajaran klasikal dengan tetap memperhatikan protocol Covid-19, dengan pola full learning maupun blended learning dengan memaksimalkan jaringan yang ada dan teknologi yang semakin berkembang dewasa ini. Namun demikian pencapaian dari 8 indikator lain juga belum maksimal mengingat keterbatasan kondisi dimasa pandemic dan BPSDMD yang masih terus menyesuaikan diri untuk dapat melaksanakan kegiatan di masa new normal saat ini.

Berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2020 sebagai penjabaran dari program yang ditetapkan, pada dasarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan sangat baik yang tercermin dari capaian indikator kinerja, meskipun masih ditemui adanya hambatan, ke depannya menjadi bahan masukan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diharapkan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perangkat daerah yang menunjang peningkatan kompetensi ASN akan terus meningkatkan performanya dalam meningkatkan kompetensi ASN guna mewujudkan profesionalisme ASN yang lebih baik. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kompetensi ASN antara lain:

1. Peningkatan sarana dan prasarana kediklatan berbasis Daring yang akan membantu BPSDMD dalam menghadapi kondisi yang tak menentu seperti yang terjadi pada awal tahun 2020;

2. Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara Diklat dan tenaga Pengajar untuk meningkatkan penguasaan Informasi Teknologi yang berkembang pesat;
3. Perbaikan perencanaan kediklatan yang lebih proporsional baik dari segi anggaran maupun pengembangan kediklatan sesuai dengan kebutuhan Kompetensi ASN:
4. Peningkatan diklat ToC dan MoT bagi penyelenggara diklat, karena dengan adanya penyelenggara diklat yang berkompeten diharapkan mampu memfasilitasi terlaksananya diklat yang berkualitas dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
5. Koordinasi lebih intens dengan TAPD dalam hal kesepahaman tentang porsi penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian target program Kepala Daerah.

Akhirnya, dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi secara transparan terkait kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat memberikan masukan dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal dokumen LKjIP Tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan isu strategis, sehingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dan ASN dengan pelayanan yang profesional.

Mataram, 2020

Kepala BPSDMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. WEDHA MAGMA ARDHI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196108101990031011

Lampiran